

PENELITIAN KOLABORASI
DOSEN DAN MAHASISWA

**PERSEPSI USAHA MIKRO DAN KECIL
TERHADAP INKLUSI KEUANGAN
DAN AKSES PERBANKAN**

PENELITIAN KOLABORASI HIBAH STRATEGI NASIONAL

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Manajemen



Oleh:

ISMAWATI
2012210051

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2016**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Ismawati

Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 26 Mei 1993

Nim : 2012210051

Jurusan : Manajemen

Proram Pendidikan : Strata 1

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Judul : Persepsi Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Inklusi
Keuangan dan Akses Perbankan

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,

Tanggal: 4/3 - 2016 .


Prof. Dr. Drs. TATIK SURYANI, Psi., M.M

Ketua Program Sarjana Manajemen

Tanggal: 4/4 - 2016


Dr. MUAZAROH S.E., M.T.

PERSEPSI USAHA MIKRO DAN KECIL TERHADAP INKLUSI KEUANGAN DAN AKSES PERBANKAN

ISMAWATI

STIE PERBANAS SURABAYA

Email : 2012210051@students.perbanas.ac.id

TATIK SURYANI

STIE PERBANAS SURABAYA

Email : Tatik@perbanas.ac.id

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

The research aim to explore the perception of Micro and Small Enterprises(SMEs) to financial inclusion policies and identify problems to acces banking. Research is designed by survey by using depth interview, beside using questionnaire. Triangulation methods was used to examine data validity. Research involved SME owners who produce local product in Mojokerto, Sidoarjo and Surabaya.This research found that perception of micro and small enterprises to financial inclusion policy is still not good. Many SMEs were not familiar with formal financial services institution such as banking institution. There are thirteen factors that become constraints which are barriers SMEs access to bank: lack of knowledge about financial, price, un able to use bank technology, lack of knowledge of banking, not availability of financial report, not availability of legal documents, location, unable to use bank technology, un familiarity with mobile, lack of knowledge of bank services, reluctant for visiting bank, belief about interest, un able to adapt with bank. .Based on this research socialization and education about financial inclusion should be conducted intensively and extensively.

Keywords :Micro and Small Enterprises, financial inclusion, and banking.

PENDAHULUAN

Indonesia dan 19 negara lain yang tergabung dalam G20 telah sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi masyarakat miskin dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Namun kenyataannya, hingga saat ini belumlah banyak UMK yang

mampu mengakses keuangan. Hal ini tentu menjadi kendala bagi UMK untuk berkembang. Selain itu UMK merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia dalam menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga Pelaku UMK yang mencakup 99% dari pelaku

usaha di Indonesia belum seluruhnya mendapatkan layanan keuangan

Inklusi

keuangan adalah bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat yang ada di kalangan bawah (*the bottom of the pyramid*) untuk memanfaatkan produk jasa keuangan formal

(www.bi.go.id) Sistem inklusi keuangan tidak hanya menyediakan kredit bagi masyarakat miskin dan usaha mikro kecil, namun juga memiliki tujuan yang lebih holistik, yaitu mengurangi angka kemiskinan, melakukan distribusi pendapatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas tanpa mengorbankan dan bahkan menopang stabilitas sistem keuangan.

UMK di Surabaya terus tumbuh setiap tahunnya, tidak hanya dalam hal jumlah, namun kualitas dan pemasaran produk sudah merambah pasar luar negeri. Upaya persiapan terus dilakukan, yakni dengan memperkuat sektor dunia usaha lokal. Pertumbuhan UMK juga terjadi di Sidoarjo. Para pelaku UMK menciptakan daya saing bagi produk-produknya di pasaran. Kekuatan Kabupaten Sidoarjo tidak hanya di nilai dari komoditas unggulannya, tetapi juga wilayahnya yang strategis, Bandara Internasional Juanda dan Terminal Bus antar Provinsi Bungurasih terletak di Kabupaten Sidoarjo. Akses jalan tol ke Pelabuhan Tanjung Perak juga sangat mudah sehingga masyarakat

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka peneliti ingin mengkaji tentang persepsi UMK di wilayah Mojokerto, Surabaya dan Sidoarjo terhadap inklusi keuangan

dari luar kota, luar pulau, bahkan dari luar negeri mudah menjangkau Kabupaten Sidoarjo. UMK di Kabupaten ini berkembang dengan baik.

Selain Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto merupakan kota yang terletak cukup strategis, 50 km arah barat Kota Surabaya, daerah ini menjadi *hinterland* kota metropolitan dan termasuk dalam Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan). Dari data keragaman UMK unggulan per 30 Juni 2013 yang dikutip dari Dinas Koperasi dan UMK Jawa Timur, Kota Mojokerto merupakan peringkat ketiga tertinggi dari daftar UMK unggulan Jawa Timur. Dilihat dari kondisi perekonomian, daerah Kota Mojokerto dari tahun 2009-2011 terus mengalami peningkatan. Dengan jumlah penduduk 134.222 jiwa pada tahun 2011 Kota Mojokerto menjadi salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi yaitu 8.152 penduduk per kilometer persegi. Melihat kondisi ini maka pengembangan industri besar sangat tidak memungkinkan, sehingga melihat potensi yang ada maka pengembangan UMK menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kota Mojokerto bersama *stakeholder* yang ada untuk mengembangkan perekonomian masyarakat bahkan meningkatkan pertumbuhan daerah. (Ortina Rezki, 2014).

dan akses ke perbankan. Pemilihan daerah UMK dalam penelitian ini didasarkan pada letak wilayah dan akses ke perbankan yang hampir sama.

Kajian ini penting untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang kendala UMK dalam mengakses lembaga perbankan serta persepsi UMK yang terkait dengan hal tersebut.

KERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN PROPOSISI

Inklusi keuangan

Financial inclusion adalah program yang dimaksudkan untuk membuat masyarakat khususnya kelas menengah-bawah mengerti dan menggunakan jasa layanan institusi keuangan utamanya perbankan (Kumar, 2013:6) sedangkan *Financial exclusion* adalah kondisi dimana masyarakat belum memiliki akses ke perbankan atau belum berhubungan dengan bank, sehingga mereka tidak punya rekening di bank (Sinclair, 2013:658)

Strategi inklusi keuangan bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam inklusi keuangan tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga Regulator, Kementerian dan Lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi inklusi keuangan diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur. (www.bi.go.id)

50 persen orang dewasa diseluruh dunia memiliki rekening dilembaga keuangan formal, meskipun berbeda pendapatan dan karakteristik individu.

Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik memiliki tujuan

menawarkan tabungan, kredit, pembayaran dan manajemen risiko produk kepada orang-orang dengan berbagai macam kebutuhan. (Demirguc dan Klapper, 2013).

Dalam penelitian Sinclair (2013) Terdapat 6 aspek yang dikaji terkait adanya inklusi keuangan yaitu jasa perbankan, kredit, asuransi, tabungan, konsultasi keuangan serta pemahaman pada fasilitas jasa keuangan. Penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan jasa perbankan dalam meminjam uang adalah karena minimum jumlah pinjaman yang masih tinggi padahal kebutuhan dana yang dipinjam kecil dan dalam jangka waktu pendek. Sebagai contoh lain adalah penelitian Madhavi (2011) di India dan Fungacova dan Weill (2014) di Cina.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM mampu bertahan di tengah krisis yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1997, dan bahkan samapi sekarang.

Sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) pengertian UMKM dibagi menjadi tiga macam:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam undang-undang tersebut.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

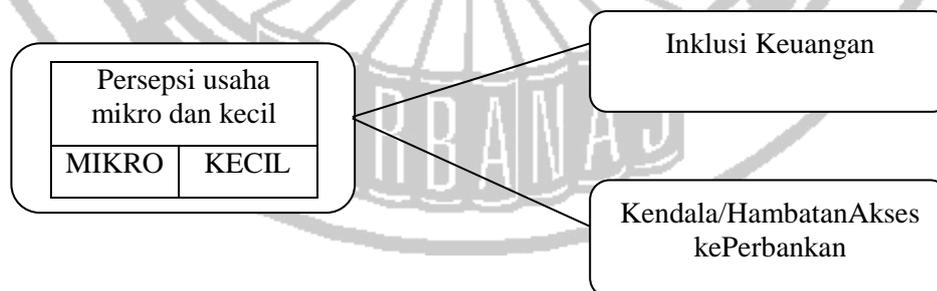
Tabel 2.2
Kriteria UMKM

Uraian	Kriteria	
	Asset	Omzet
Usaha Mikro	Max 50 jt	Max 300 jt
Usaha Kecil	>50jt– 500jt	>300jt–2,5M
Usaha Menengah	>500jt–10M	>2,5M–50M

Sumber: Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu maka kerangka

pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.3
Kerangka Berpikir

Proposisi penelitian berdasarkan kerangka pemikiran yang disajikan pada Gambar 2.3 maka

proposisi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. persepsi usaha mikro dan kecil terhadap kebijakan inklusi keuangan masih kurang baik
2. terdapat beberapa kendala/hambatan yang dihadapi usaha mikro dan kecil untuk mengakses perbankan.

merupakan wilayah cakupan Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

PersepsiUMKterhadapkebijakan inklusi keuangan adalah pandanganpelakuUMKterhadap pelayanankeuangan (*financial service deepening*) yang ditujukankepadamasyarakattermasuk usaha mikro dan kecilyang belummemanfaatkanlayananperbankanataulembagakeuangan formal.

Permasalahan yang terjadi pada perkembangan UMK adalah hal-hal yang meyebabkan UMK kesulitan mengakses ke perbankan.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini berupa kuesioner terbuka, sehingga memungkinkan informan memberikan jawaban seluas-luasnya sesuai dengan pengalaman, persepsi dan pendapatnya. Kuesioner berisikan pertanyaan yang menyangkut variabel yang telah di tuliskan serta instrumen-instrumen yang dibutuhkan di dalam pengolahan data penelitian.

UjiValiditasdanReliabilitasInstrumenPenelitian

Menurut Neuman (2011:214) dalam penelitian kualitatif penting untuk merujuk pada data yang autentik. Data yang autentik adalah data yang benar, data yang jujur serta berimbang dari sudut pandang pihak-pihak yang mengetahui fenomena yang dikaji.

Uji validasi dan reabilitas dilakukan dengan teknik triangulasi,

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama karena tuuan untuk mengidentifikasi permasalahan secara mendalam mengenai persepsi UMK terhadap inklusi keuangan dan akses ke perbankan sesuai dengan tujuan penelitian dan pendekatan ini memiliki faktor fleksibilitas yang tinggi, sehingga peneliti dapat leluasa untuk menggali berbagai hal dalam penelitian (Neuman, 2011 : 149).

Penelitian ini menggunakan survey, dilakukan dengan menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpul data (Sekaran dan Bougie, 2010). selain itu penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi (*exploratory study*) karena bertujuan untuk Mendapatkan pemahaman mendalam tentang inklusi keuangan (Willig, 2009).

Batasan Penelitian

Variabel dalam penelitian iniadalah inklusi keuangan. Untuk objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 UMK yang menghasilkan produk unggulan diwilayahMojokerto, SurabayadanSidoarjo yang

yaitu menggunakan beberapa metode sekaligus dalam suatu penelitian yang dilakukan secara linier atau silang untuk menguji apakah data yang diperoleh dalam penelitian adalah sah dan benar.

Validitas dan reabilitas data menurut Neuman (2011:149) dapat dilakukan dengan beberapa triangulasi, diantaranya adalah triangulasi pengukuran, triangulasi peneliti, triangulasi teori dan triangulasi metode. Mengacu pada pendapat Neuman (2011: 149) tersebut, dalam penelitian ini triangulasi digunakan melalui triangulasi teori dan triangulasi metode. Triangulasi teori dilakukan dengan melihat teori inklusi keuangan dan akses perbankan dari beberapa konsep teori yang relevan dengan topik. Triangulasi metode dilakukan dengan cara penggunaan berbagai metode pengumpulan data, dimana data penelitian yang digunakan untuk analisis diperoleh dari hasil tiga metode yang berbeda, yaitu: kuesioner, wawancara dan observasi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi
Metode observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas persepsi UMK terhadap inklusi keuangan dan permasalahan-permasalahan UMK untuk akses ke lembaga keuangan yang tersedia. Observasi dilakukan di wilayah Mojokerto, Surabaya dan Sidoarjo.
2. Wawancara

Wawancara berperan penting untuk meningkatkan kedalaman dan keakuratan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada pemilik UMK yang menjadi informan, dengan kriteria lama usaha. Satu informan untuk usaha kurang dari tiga tahun, satu informan dari lama usaha sama dengan lima tahun dan satu informan dari lama usaha Sepuluh tahun. Wawancara akan dilakukan dengan metode semi terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk mempertajam dan meningkatkan kualitas data yang diperoleh.

3. Kuesioner

Suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada responden yang menjadi pemilik UMK di wilayah Mojokerto, Surabaya dan Sidoarjo. Dapat juga dilakukan dengan menjelaskan dan membimbing responden dengan cara : membagikan kuesioner kepada responden, menjelaskan dan membimbing responden tentang cara pengisian kuesioner, responden menjawab yang diajukan pada lembar kuesioner, kuesioner yang telah diisi oleh responden dikumpulkan untuk kemudian diseleksi dan diolah.

Teknik Analisis

Langkah pertama dalam analisis data kualitatif adalah pengkodean dan pengelompokkan (Sekaran dan

Bougie, 2010 : 372). Melalui pengkodean, data kualitatif dapat di atur dan diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu dan di integrasikan kedalam bentuk teori. Tujuan utama dari pengkodean adalah untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

Setelah selesai dilakukan proses kategorisasi di mana unit kode diatur dan diklasifikasikan kedalam kategori-kategori tertentu (Sekaran dan Bougie, 2010: 374). Pemberian kode dan penyusunan kategori dilakukan berdasarkan penelitian sebelumnya dan landasan teori yang telah ada sebelumnya. Melalui kategorisasi data, akan tampak pola dan hubungan antar data penelitian. Hali ini dapat dibantu dengan menampilkan data dalam bentuk tabel, diagram, grafik, gambar atau terutama dalam bentuk matriks (Sekaran dan Bougie, 2010 : 328) Langkah terakhir adalah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif demografi responden penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden adalah laki-laki 60% dan sisanya adalah perempuan. 43% pemilik UMK yang menjadi responden didominasi usia lebih dari 40-55 tahun. Selain itu, pendidikan responden setengahnya di

miliki oleh lulusan SMA/SMK sebanyak 57%. Meskipun mayoritas adalah SMA/SMK, kinerja bisnis mereka sangat baik, hal ini karena mereka cenderung belajar dari pengalaman mereka. Banyak yang dari mereka memiliki 1-4 orang pegawai, hal ini ditunjukkan oleh persentase kuesioner. Sebesar 80% responden dalam penelitian ini memanfaatkan sumber pembiayaan pada awal mendirikan usaha menggunakan bank dengan persentase 57%, tapi masih banyak pengusaha mikro dan kecil dalam mendirikan usaha menggunakan modal sendiri.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian sebelumnya, inklusi keuangan didefinisikan sebagai penggunaan akun formal (Allen et al, 2012). Belum dimilikinya akun formal khususnya perbankan disebabkan karena kesulitan untuk mengakses produk lembaga formal yang paling sederhana seperti tabungan dan kredit sampai produk yang kompleks seperti pensiun dan asuransi.

Ketika informan ditanya dengan pertanyaan pendek “Apakah saudara pernah mendengar kebijakan inklusi keuangan?” berikut hasil perolehan dari kuesioner dan wawancara:



Sumber: Data diolah

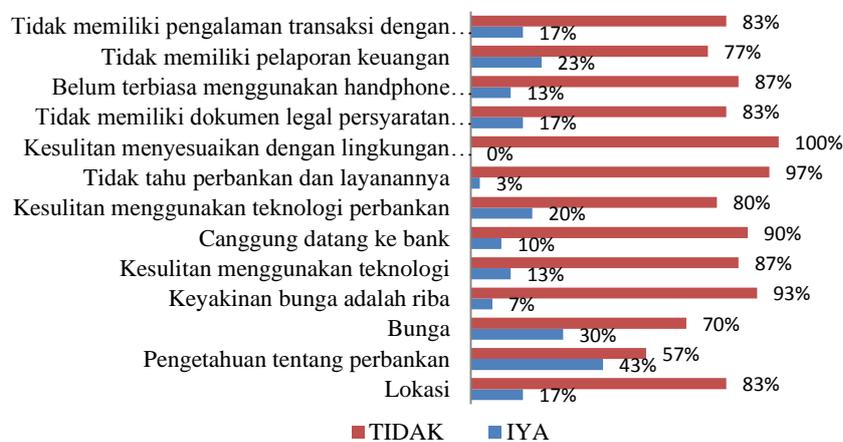
Gambar 4.12

Responden yang Pernah Mendengar Kebijakan Inklusi Keuangan

Berdasarkan Gambar 4.12 dapat dijelaskan bahwa informan yang pernah mendengar kebijakan inklusi keuangan hanya 3% atau satu orang dari total responden. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi pengusaha mikro dan kecil terhadap kebijakan inklusi keuangan masih kurang baik. Selain inklusi keuangan yang kurang baik, terdapat beberapa kendala/hambatan yang dihadapi UMK untuk mengakses perbankan. Hasil Pengumpulan data

yang dilakukan melalui wawancara dan kuesioner bahwa 66,7% responden mengalami kesulitan dalam mengakses jasa perbankan.

Alasan UMK mengalami kesulitan dalam mengakses jasa perbankan adalah karena beberapa faktor. Hasil penelitian yang dilakukan pada hambatan yang dialami UMK dalam mengakses jasa perbankan disajikan dalam Gambar 4.13



Sumber : Data diolah

Gambar 4.13

Faktor yang Menghambat untuk Mengakses Jasa Perbankan

Berdasarkan Gambar 4.13 didapat faktor-faktor yang menghambat untuk mengakses jasa perbankan adalah: (1) Tidak memiliki pengetahuan tentang perbankan, (2) Biaya (bunga), (3) Tidak memiliki sistem pelaporan keuangan, (4) Tidak memiliki dokumen legal yang menjadi persyaratan untuk menjadi nasabah bank, (5) Kesulitan dalam menggunakan teknologi perbankan, (6) Tidak memiliki pengalaman melakukan transaksi dengan perbankan, (7) Jarak/Lokasi jauh, (8) Kesulitan menggunakan teknologi, (9) Belum terbiasa menggunakan *handphone* untuk transaksi dengan

bank, (10) Merasa asing atau canggung untuk datang ke bank, (11) Keyakinan bahwa bunga adalah riba, (12) Tidak tahu tentang perbankan dan layanannya, (13) Kesulitan dalam menyesuaikan dengan lingkungan di bank.

Kendala utama dalam mengakses jasa perbankan karena kurangnya pengetahuan tentang produk dan jasa bank. Ada 43% UMK yang tidak tahu produk dan layanan perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa produk dan layanan perbankan yang sebenarnya membantu dalam pengembangan bisnis tidak dapat dimanfaatkan

dengan baik karena kurangnya informasi tentang perbankan. Beberapa responden menjelaskan bahwa *“Sulit untuk mendapatkan kredit dari bank karena banyak prosedur”*. Mereka menerima informasi negatif tentang konsekuensi jika pinjaman tidak dapat dibayar sesuai ketentuan. Ketidaktahuan produk dan layanan juga menyebabkan kehilangan persepsi bank. Kesalahpahaman ini terjadi karena kurangnya informasi yang diterima UMK.

Tingkat suku bunga yang dianggap tinggi oleh UMK adalah faktor kedua yang menghambat UMK untuk mengajukan kredit. Proporsi tingkat suku bunga yang tinggi sebesar 30%. Beberapa pemilik UMK yang menjadi responden dalam penelitian ini mengatakan bunga yang harus dibayarkan ke bank terlalu tinggi, lebih baik disimpan sendiri dirumah atau dipakai untuk membeli bahan baku. Hasil ini konsisten dengan penelitian Helms dan Rielle (2004) bahwa tingkat bunga yang tinggi tidak menjadi solusi untuk menjawab kekhawatiran para usaha mikro dan kecil.

Aspek lain yang juga membutuhkan perhatian adalah ketersediaan laporan keuangan (23%) dan kesulitan dalam memenuhi dokumen legal untuk persyaratan memperoleh sumber pembiayaan (17%). Kondisi ini mengakibatkan pada penolakan atau ragu-ragu dari bank untuk memberikan kredit. Bank juga tidak berani untuk memberikan kredit karena beresiko bagi bank. Kesulitan menggunakan teknologi perbankan menjadi salah satu faktor

yang menjadi penghambat untuk mengakses ke jasa perbankan. Perkembangan teknologi disektor perbankan, akan memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk menggunakan produk dan layanan perbankan. Kondisi pendidikan responden dalam penelitian ini yang didominasi oleh pendidikan terakhir SMA (57%), memudahkan bank untuk melakukan sosialisasi guna mendorong pengusaha UMK mengerti dan memahami teknologi perbankan.

Faktor lain yang menjadi hambatan adalah lokasi. Sebanyak 17% responden mengalami kesulitan akses karena lokasi bank jauh dari tempat usaha mereka. beberapa responden mengatakan *“Daerah disini perkampungan, jadi tidak ada bank, dan untuk pergi ke bank membutuhkan waktu yang lama”*. Hal ini menunjukkan bahwa ada keinginan untuk pergi ke bank, namun lokasinya terlalu jauh. Selain lokasi bank yang terletak jauh dari usaha, teknologi juga menjadi hambatan untuk akses ke jasa dan layanan perbankan (17%). Kesulitan menggunakan teknologi dapat terjadi karena pengalaman pengusaha UMK yang kurang melakukan transaksi di bank serta memanfaatkan produk dan layanan lainnya. Karena kondisi ini dibutuhkan program yang memperkenalkan fitur bank pada UMK dan semua informasi yang terkait dengan layanan dan jasa perbankan.

Faktor lain yang menjadi penghalang adalah kesulitan menggunakan teknologi dan belum terbiasa menggunakan handphone untuk transaksi dengan bank. Hal ini

ditunjukkan dengan proporsi 17% dari total responden.

Faktor lain yang menjadi kendala, meskipun tidak terlalu signifikan adalah merasa asing atau canggung untuk datang ke bank dan tingkat keyakinan bahwa bunga adalah riba, tidak tahu tentang perbankan dan kesulitan dalam menyesuaikan dengan lingkungan bank.

Dari 13 faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok.

Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan analisis, dengan memperhatikan aspek relevansi dan kesesuaian pada faktor kendala yang dialami UMK. Pengelompokan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pengelompokan Faktor yang Menghambat Akses Perbankan

Faktor yang menghambat ke akses dan layanan perbankan	
Pengetahuan perbankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki Pengetahuan tentang perbankan 2. Tidak memiliki Pengetahuan tentang perbankan 3. Tidak memiliki pengalaman transaksi dengan perbankan 4. Kesulitan dalam menyesuaikan dengan lingkungan bank
Bunga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bunga (biaya) 2. Keyakinan bahwa bunga adalah riba
Dokumen untuk menjadi nasabah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki pelaporan keuangan 2. memiliki dokumen legal yang menjadi persyaratan untuk menjadi nasabah
Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan menggunakan teknologi perbankan 2. Kesulitan menggunakan teknologi 3. Belum terbiasa menggunakan <i>handphone</i> untuk transaksi dengan bank
Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi 2. Merasa asing/canggung untuk datang ke bank

Pengelompokan ini dilakukan untuk mempertajam analisis dan memudahkan dalam penyusunan kebijakan.

**KESIMPULAN,
KETERBATASAN DAN SARAN**

Kesimpulan

Persepsi UMK terhadap kebijakan inklusi keuangan masih kurang baik. Masih banyak UKM yang belum mengenal lembaga keuangan formal terutama dan layanannya. Hambatan yang dihadapi oleh pengusaha UMK untuk akses layanan perbankan berdasarkan

penelitian dapat disimpulkan bahwa ada tiga belas faktor yaitu: jarak/lokasi, tidak memiliki pengetahuan tentang perbankan, biaya (bunga), keyakinan bahwa bunga adalah riba, kesulitan dalam menggunakan teknologi, merasa asing/canggung untuk datang ke bank, kesulitan dalam menggunakan teknologi perbankan, tidak tahu tentang perbankan dan layanannya, kesulitan dalam menyesuaikan dengan lingkungan bank, tidak memiliki dokumen legal yang menjadi persyaratan untuk menjadi nasabah bank, belum terbiasa menggunakan *handphone* untuk

transaksi dengan bank, tidak memiliki sistem pelaporan keuangan, tidak memiliki pengalaman melakukan transaksi dengan perbankan.

Dari 13 faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu pengetahuan perbankan, bunga, dokumen untuk menjadi nasabah, teknologi, dan lokasi.

Keterbatasan:

Meskipun penelitian ini telah dirancang sesuai dengan metode ilmiah, dan telah diupayakan untuk memenuhi rancangan yang dibuat, namun demikian masih terdapat beberapa keterbatasan, Pertama, kurang lama waktu wawancara dengan informan akibat terbatasnya waktu dan kesibukan informan. Selain itu, penggunaan istilah dalam penelitian yang agak sulit, sehingga responden dengan latar belakang non-ekonomi kurang memahami maksud dari peneliti. Dan, terbatasnya data tentang inklusi keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga banyak rujukan yang terkait dengan inklusi keuangan mengacu pada penelitian luar. Ada penelitian Bank Indonesia tetapi masih bersifat global kurang mendalam fokus pada kepemilikan akun.

Saran:

Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan kepada lembaga keuangan formal (bank) adalah Melakukan promosi atau menyebarluaskan produk dan layanan perbankan pada kelompok usaha mikro dan kecil di daerah-

daerah. Selain itu menurunkan suku bunga pinjaman dengan melakukan pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM) oleh BI. Dan memberikan pelatihan, konsultasi dan bimbingan tentang dokumen pendukung seperti laporan keuangan serta operasional lainnya pada UMK dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Serta memberikan informasi teknologi serta fitur-fitur perbankan yang akan memudahkan pengusaha mikro dan kecil untuk mengakses perbankan.

Bagi Pemerintah, perlu memberikan sosialisasi edukasi keuangan terutama tentang inklusi keuangan dan memberikan informasi kepada UKM untuk mengenal dan akses ke lembaga keuangan formal terutama bank. Riset-riset tentang inklusi keuangan terhadap UMK dan masyarakat masih banyak dibutuhkan.

Bagi UMK, harus lebih aktif untuk mencari akses pemerintah maupun lembaga keuangan formal terutama bank melalui kelompok sentral industri supaya dapat informasi yang banyak tentang keuangan yang dapat meningkatkan potensi usahanya.

Bagi peneliti selanjutnya, jika ingin mengkaji lebih mendalam lagi tentang persepsi inklusi keuangan dan akses ke perbankan wawancara yang lebih mendalam dan lebih lama sebaiknya dilakukan. Melakukan penyederhanaan penggunaan kata pada kuesioner, sehingga responden dengan latar belakang non-ekonomi dapat memahami maksud dari peneliti. Mengkaji inklusi keuangan dengan mengaitkan literasi keuangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Allen, F. Demirguc-Kunt, A, Klapper, L. and M.S.M.Peria. 2012. "The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts", *Policy Research Working Paper*. The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team, pp. 1 – 68
- Bank Indonesia, 2014. "Booklet Keuangan Inklusif", *Departemen Pengembangan Akses Keuangan Dan Umkm*. Bank Indonesia: Jakarta
- Demirguc-Kunt, A. and Leora Clapper. 2012. "Financial Inclusion in Africa". *Policy Research Working Paper*. The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team, pp. 1 – 18
- Kumar, Nitin. 2013. "financial inclusion and its determinants: Evidence from india". *journal of financial economic policy*. vol. 5 No 1. Emerald Group Publishing
- Lokhande, Madhavi A. 2011. "Financial Inclusion : Options for Micro, Small and Medium Enterprises" *Synergy (July, 2011), Vol. IX No.11*.
- Ortina Rezki. 2014. "Analisis Pembedayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus pada Kota Mojokerto). *Jurnal Ilmiah*, Universitas Brawijaya
- Reille, X, & Helms, B. (2004, September). "Interest rate ceilings and microfinance"
- Sekaran, U. And Bougie, R. 2010. *Research Methods For Business – A Skill Building Approach*, 5th Edition, Willey And Sons : New York
- Sinclair, Stephen. 2013. "Financial Inclusion And Social Financialisation: Britain In A European Context". *International Journal Of Sociology And Social Policy*. Vol.33 No 11/12. Emerald Group Publishing.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Sekretariat Negara RI: Jakarta.
- Weill, Laurent, Zusana Fungacova. 2014. "Understanding Financial Inclusion in China" *China Economic Review 34 (2015) 196-206*
- Willig, C. 2009. *Introducing Qualitative Research In Psychologi*. Open University Press: New York
- www.bi.go.id, diakses 14 April 2015.
- www.depkop.go.id, diakses 15 April 2015.

www.ojk.go.id, diakses 14 April 2015.

